

PENGARUH JUMLAH PDRB DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP APBK KOTA BANDA ACEH

Muhammad Alkindi^{1*}, Fikriah²

- 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
email : malkindi99@yahoo.com
- 2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
email : haridhi_fikriah@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to see the influence of total GDP and poverty level in Banda Aceh city towards Local Government Budget. The type of data used in this research is secondary data such as, GDP data on the basis of current prices, data of the poor people, and local government budget data of Banda Aceh city from range 2005-2016. This study uses Ordinary Least Square (OLS) model or multiple linear regression to see the effect of GDP and poverty level on local government budget. The results of this study show that GDP has a positive and significant influence on the local government budget while the poverty level has a negative and significant influence on the local government budget of Banda Aceh city. GDP growth has an impact on the increase of LOCAL government budget as well as the decreasing of poverty which impacts the high local government budget value of Banda Aceh city.

Keywords: *Local Government Budget, GDP, Poverty, Public Concentration.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh dari jumlah PDRB dan tingkat kemiskinan yang ada di kota Banda Aceh terhadap nilai APBK. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder seperti, data PDRB atas dasar harga berlaku, data penduduk miskin, dan data APBK kota Banda Aceh dengan tahun penelitian dari 2005-2016. Penelitian ini menggunakan model Ordinary Least Square (OLS) atau regresi linier berganda untuk melihat pengaruh dari PDRB dan tingkat kemiskinan terhadap APBK. Hasil dari penelitian ini menunjukkan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap APBK sedangkan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap APBK kota Banda Aceh. Pertumbuhan PDRB berdampak pada peningkatan APBK demikian pula dengan berkurangnya kemiskinan yang berdampak tingginya nilai APBK kota Banda Aceh.

Kata kunci: APBK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Kemiskinan, Konsentrasi Publik

PENDAHULUAN

Pada dasarnya apabila kegiatan perekonomian bagus atau aktivitas ekonomi meningkat di suatu daerah maka akan diikuti oleh kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat tentu menjadi salah satu hal terpenting yang harus ditingkatkan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Siregar & Mudawali, 2013).

Seiring dengan perlunya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu menyediakan berbagai kebutuhan publik untuk menyokong peningkatan kesejahteraan tadi. Meningkatkan anggaran belanja pemerintah salah satunya. Dengan belanja yang tinggi maka pembangunan fasilitas publik, subsidi, dan sebagainya dapat dilakukan. Oleh karena itu kegiatan perekonomian di suatu daerah pada periode tertentu akan menjadi tolok ukurnya. Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak terelakkan pemerintah (Sukirno, 2004).

Pada tingkat Kota, APBK Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah di Kota Banda Aceh. Dalam 5 tahun belakang pertumbuhan yang paling terlihat pada tahun 2012-2013. Angka tertinggi dari pertumbuhan pendapatan daerah terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 22,18 persen. Belanja daerah juga demikian mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014.

PDRB Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan. Berdasarkan indeks dapat dilihat kenaikan dari waktu ke waktu yang paling tinggi pada tahun 2012 dengan pertumbuhan 28,71 persen. Setiap adanya kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD dalam pemerintah daerah (Adi, 2006).

Perekonomian Kota Banda Aceh sebagai kesatuan ekonomi yang menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Meningkatnya nilai PDRB menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian, begitu pula sebaliknya. Perekonomian Kota Banda Aceh terus meningkat dilihat dari nilai PDRB ADHB selama lima tahun terakhir. PDRB Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 845,57 milyar per tahun selama kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2016 PDRB meningkat sebesar Rp 1,3 triliun dari Rp 14,48 triliun pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan adanya pelaksanaan proyek konstruksi tahun jamak dengan nilai kontrak besar. PDRB Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku tahun 2016 sebesar Rp 15,80 triliun rupiah menjadikan Kota Banda Aceh sebagai penyumbang kedua terbesar PDRB Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan kabupaten penghasil migas terbesar di provinsi ini. Meski demikian, dengan telah selesainya periode eksploitasi migas di Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh berpeluang menjadi penyumbang PDRB terbesar Provinsi Aceh di masa depan (BPS Kota Banda Aceh, 2017).

Tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 adalah 7,41 persen. Nilai tersebut tentu tidak buruk mengingat tingkat rata-rata kemiskinan nasional yang berada di 10 persen. Namun nilai tersebut tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 yang menargetkan proyeksi angka kemiskinan pada tahun 2017 turun menjadi

4,94 persen. Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang (Tambunan, 2001).

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah adalah ditandai oleh kemampuan keuangan daerah. Suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu Kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk menyelenggarakan pemerintahannya Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Halim, 2001).

Pada tahun 2008-2012 PDRB Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan. Namun dengan meningkatnya PDRB ternyata tidak terlalu membantu dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2008-2009 penduduk miskin mengalami penurunan jumlah, namun pada tahun 2009-2010 dan 2010-2011 jumlah penduduk miskin bertambah. Tentu hal ini menjadi permasalahan mengingat laju pertumbuhan PDRB yang terus meningkat setiap tahunnya. Sumber permasalahan terjadi pada tahun 2008 dimana baik pendapatan maupun belanja daerah sama-sama turun nilainya. Dalam APBK hal ini tentu terkait dengan rancangan yang dibuat dari tahun sebelumnya, sehingga dengan adanya penurunan nilai dari APBK itu tadi juga berdampak pada pergerakan tidak normal dari laju kemiskinan maupun PDRB.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK)

Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU Nomor 22 Tahun 1999 (dan UU Nomor 32 Tahun 2004) melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat rancangan APBK yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRK dalam proses ratifikasi anggaran (Ekawarna, 2009).

Anggaran pemerintah berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk paling sederhana, anggaran pemerintah merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang (Ekawarna, 2009).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi seluruh kegiatan ekonomi dalam batas wilayah suatu daerah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan. PDRB lazim disajikan menurut lapangan usaha (sektoral) dan menurut komponen penggunaan, masing-masing atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017).

Ada dua sistem penilaian yang digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018) yaitu: Atas Dasar Harga Berlaku adalah harga yang berlaku pada tahun perhitungan. Jadi PDRB atas

dasar harga berlaku adalah PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada masing-masing tahun perhitungan. Sedangkan yang kedua Atas Dasar harga Konstan, adalah harga pada tahun tertentu yang diperlukan sebagai tahun dasar. Karena menggunakan harga yang tetap, maka pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh perkembangan produksi dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan).

Kemiskinan

Menurut BPS (2010), bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata memiliki pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan per bulannya. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Indikator kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan dan ekonomi (konsumsi per kapita). Untuk menentukan seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak maka diperlukan tolok ukur yang jelas. Berbagai pendekatan atau konsep digunakan sebagai bahan perhitungan dan penentuan batas-batas kemiskinan (Prihartini, 2006).

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidak nyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Pratiwi & Sutrisna, 2014)

Penelitian Sebelumnya

Ketika sebuah negara mampu, ekspansi yang dirancang dengan baik dalam sistem perlindungan sosial dapat memainkan peran penting dalam mempertahankan pengurangan kemiskinan selama periode stagnasi ekonomi. Kedua, kebijakan makroekonomi dan perdagangan tidak perlu menyakiti orang miskin bahkan dalam jangka pendek (Ferreira, Leite, & Ravallion, 2010).

Permasalahan kemiskinan tidak cukup hanya dipecahkan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Peningkatan kualitas SDM akan mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap pengurangan angka kemiskinan yang terjadi (Suliswanto, 2010).

Penelitian yang serupa bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di daerah Aceh, karena ketergantungan daerah Aceh pada APBD. Hasilnya apabila realisasi belanja daerah meningkat maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan juga kemiskinan (Siregar & Mudawali, 2013).

Variabel bebas terdiri dari Dana alokasi umum, Belanja modal, Pendapatan asli daerah, sedangkan variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per kapita. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dengan menggunakan periode penelitian tahun 2001-2004. Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah (David Harianto, 2007).

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh APBK terhadap tingkat kemiskinan penduduk dan PDRB di Kota Banda Aceh. Variabel yang digunakan adalah data APBK, PDRB, dan jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh dari tahun 2005-2016.

Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data APBK, PDRB, dan jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh dari tahun 2005-2016. Pengumpulan data PDRB dan kemiskinan Kota Banda Aceh diambil dari BPS Kota Banda Aceh dan dari Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh.

Model *Ordinary Least Square* (OLS)

Model Analisis Data

Model Regresi

Sesuai dengan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah di bahas sebelumnya Model regresi dalam penelitian ini adalah menggunakan model *Ordinary Least Square* (OLS), Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel- variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya dengan metode OLS dari analisis regresi linier akan diperoleh koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas dan sejauh mana hubungan dari variabel-variabel bebas tersebut secara bersama-sama. Model atau peralatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda (Gujarati, 2006).

$$LAPBK_i = \beta_0 + \beta_1 LPDRB + \beta_2 Pov + e$$

Keterangan:

APBK_i : APBK Kota Banda Aceh

β_0 : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien Regresi

PDRB : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banda Aceh

Pov : Persentase Penduduk Miskin

e : Error Term

L : Log

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil regresi maka model persamaan harus terbebas dari persamaan asumsi klasik. Uji yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah nilai residual data terdistribusi secara normal atau tidak. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model dalam penelitian ini karena gangguan varian yang berbeda antar variabel satu ke variabel lain.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling memengaruhi atau tidak. Dari uji autokorelasi tersebut dapat terlihat masing-masing variabel bebas saling memengaruhi atau tidak, untuk mengetahui hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Obs R-Square.

HASIL PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Estimasi

Dependent Variable: LBELANJA_DAERAH
 Method: Least Squares
 Date: 05/10/18 Time: 18:45
 Sample: 1 12
 Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LJUMLAH_PDRB	0.800776	0.044060	18.17466	0.0000
PENDUDUK_MISKIN_____	-0.117928	0.031415	-3.753861	0.0045
C	15.55223	0.784336	19.82853	0.0000
R-squared	0.976627	Mean dependent var		27.27654
Adjusted R-squared	0.971433	S.D. dependent var		0.505396
S.E. of regression	0.085421	Akaike info criterion		-1.870126
Sum squared resid	0.065671	Schwarz criterion		-1.748899
Log likelihood	14.22076	Hannan-Quinn criter.		-1.915008
F-statistic	188.0280	Durbin-Watson stat		2.120042
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Regresi Linier Berganda Data Output Eviews9

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBK. Sedangkan pada variabel Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil dari regresi juga menjelaskan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat dilihat dari nilai R-Squared sebesar 0,976627. Artinya bahwa variabel APBK dapat mempengaruhi jumlah PDRB dan Penduduk Miskin sebesar 97,66 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Koefisien determinasi Adj. R-Square sebesar 0,971433 yang artinya variabel-variabel bebas (PDRB dan Penduduk miskin) secara bersama mampu menjelaskan variabel terikat (APBK) sebesar 97,14 persen.

Sebelum melakukan pengujian model regresi maka terlebih dahulu diperlukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji serial korelasi, dan uji multikolinearitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini, yaitu:

1. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan APBK kota Banda Aceh yang menunjukkan dengan tingginya angka PDRB maka angka APBK juga semakin meningkat.
2. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APBK kota Banda Aceh yang menunjukkan dengan berkurangnya tingkat kemiskinan maka angka dari APBK meningkat.
3. Nilai R-Square yang didapat sebesar 0.976627 atau 97,66 persen, artinya bahwa variabel jumlah PDRB dan Penduduk Miskin dapat mempengaruhi APBK sebesar 97.66 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Koefisien determinasi Adj. R-Square sebesar 0.971433 yang artinya variabel-variabel bebas (PDRB dan Penduduk miskin) secara bersama mampu menjelaskan variabel terikat (APBK) sebesar 97.14 persen.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih bijaksana dalam mengatur keuangan daerah agar tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat, jadi harus lebih efektif dalam menganggarkan belanja daerah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dan menambah periode penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, B. K. (2017). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Menurut Pengeluaran*. Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh.
- Aceh, B. P. (t.thn.). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh : <https://aceh.bps.go.id>
- Aceh, B. P. (2017). *Provinsi Aceh dalam angka 2017*. Banda Aceh: CV. Almufadar Insu.
- Aceh, B. P. (2018, 1 12). *Produk Domestik Regional Bruto*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh : <https://aceh.bps.go.id/>
- Aceh, H. P. (2012, Oktober 19). *Angka Kemiskinan Di Kota Banda Aceh Mengalami Penurunan*. Diambil kembali dari PORTAL RESMI KOTA BANDA ACEH: <https://bandaacehkota.go.id/berita/172/angka-kemiskinan-di-kota-banda-aceh-mengalami-penurunan.html>
- Adi, P. H. (2006). *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi.
- Adi, P. H. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, studi Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.
- Alfian, & Selo Soemardjan, M. G. (1980). *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu Persada.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah : Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Basyir, Hamzah, A., & Syahnur, S. (2015). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 57-70.
- David Harianto, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Ekawarna, S. A. (2009). Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mauro Jambi. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 49-66.
- Ferreira, F. H., Leite, P. G., & Ravallion, M. (2010). Poverty reduction without economic growth? Explaining Brazil's poverty dynamics, 1985-2004. *World Development Vol. 59*, 313-326.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. R. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: PT. Erlangga.

- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN .
- Moore, J. D., & Donaldson, J. A. (2016). Human-Scale Economics: Economic Growth and Poverty Reduction in Northeastern Thailand. *World Development Vol. 85*, 1-15.
- Pratiwi, S., & Sutrisna, K. (2014). Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, Dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* .
- Prihartini, D. A. (2006). Perbandingan Total Kemiskinan Versi Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dengan Peran Strategis dari Usaha Mikro untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- Rasidin K Sitepu, B. M. (2004). Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium. *Jurnal Ekonomi IPB*
- Siregar, M. I., & Mudawali, I. (2013). Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Suliswanto, M. S. (2010). Pengaruh PDB dan IPM terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Supranto, J. (2001). *Statistik teori dan aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Susanto, I. (2014). Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012.
- Tambunan, T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. (2002). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Wiratmoko, A. (2012). Pengaruh Kegiatan Ekstra Kurikuler Robotika terhadap kecerdasan emosional siswa si SMK Negeri 3 Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta* , 1-14.